

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA  
NO 56 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  
E-GOVERNMENT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
(Studi Aplikasi MATUR Bupati)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**FAHIRA IKA ZULAIHA  
NIM. 1717303020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 56 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
(STUDI APLIKASI MATUR BUPATI)**

**ABSTRAK**

**FAHIRA IKA ZULAIHA**

**NIM. 1717303020**

Memberi pelayanan publik kepada masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagai wujud mengayomi masyarakatnya. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah kabupaten Purbalingga membuat peraturan bupati tentang *e-government* yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten Purbalingga membuat sebuah terobosan dengan menciptakan program dalam bentuk aplikasi MATUR Bupati (Media Aspirasi dan Tanya Jawab untuk Rakyat).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Purbalingga, bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, masyarakat pengguna aplikasi. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, skripsi, dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi peraturan bupati dengan aplikasi MATUR Bupati dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena dengan adanya aplikasi MATUR Bupati ini masyarakat merasa dimudahkan untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lama dalam merespon aduan dan koneksi jaringan internet. Aplikasi MATUR Bupati ini telah sesuai dengan perspektif *Maşlahah* dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak dan menghindari kemudhorotan. Aplikasi ini termasuk ke dalam *Maşlahah hajiyyah* yaitu *maşlahah* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi, namun apabila tidak dapat terwujud dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kerusakan namun akan menimbulkan kesulitan saja. MATUR Bupati bertujuan untuk menyempurnakan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan mempermudah masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

**Kata kunci:** *E-government, Aplikasi MATUR Bupati, Maşlahah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II kajian teori</b>	
A. Impelentasi Kebijakan .....	14
B. Konsep Dasar E-government .....	18

1. Pengertian E-government .....	18
2. Implementasi E-government .....	19
3. Faktor Penentu E-government .....	22
C. Aplikasi MATUR Bupati .....	24
D. <i>Maşlahah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> .....	26
3. Macam-macam <i>Maşlahah</i> .....	27
4. <i>Maşlahah</i> dalam Penyelenggaraan Negara .....	31

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Sumber Data .....	34
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keadaan Geografis Kabupaten Purbalingga .....	39
B. Implementasi Peraturan Bupati No 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan E-government di Purbalingga melalui aplikasi MATUR Bupati .....	41
C. Analisis Masalah terhadap Aplikasi MATUR Bupati .....	53

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada saat ini berjalan sangat cepat sehingga dengan mudah kita dapat mengakses informasi dalam hitungan menit bahkan detik. Tidak hanya itu dengan adanya kemajuan teknologi kita juga dapat mengetahui informasi atau berita yang terjadi di luar kota bahkan luar negeri sekalipun dengan kecanggihan teknologi tersebut. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2020 tercatat sekitar 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268, 58 juta jiwa. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramly mengatakan, dari jumlah pengguna tersebut, penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah. Sementara jumlah *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number* (MSISDNN) atau lebih dikenal dengan nomor HP yang aktif hingga saat ini sebanyak 338,2 juta. Ramly menyebut, data tersebut sebagai kekayaan penggunaan internet di Indonesia.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor telah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

---

<sup>1</sup> Fauziah Mursid, dan Esthi Maharani, “Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta,” *Republika.co.id*, <https://republika.co.id/berita/ghgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw>, diakses pada 17 Desember 2020, pukul 20.40 WIB.



melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *e-government*. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat diubah melalui pemanfaatan *e-government* menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. *E-government* menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun berada. *E-government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face to face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Menyadari akan besarnya manfaat *e-government*, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan *e-government* dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003.<sup>2</sup> Instruksi Presiden ini memuat langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi atau lembaga guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* dan merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing. Dalam implementasinya Inpres ini telah mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

Kaitannya dalam perwujudan pelayanan publik yang *Good Governance*, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. *E-Government* merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasi

---

<sup>2</sup>Hartono, dkk, "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web", *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 6, No. 1, April 2010, hlm. 9.

antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Sedangkan pengertian *e-government* menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online.<sup>3</sup>

Kabupaten Purbalingga sendiri memiliki peraturan bupati yang mengatur pelaksanaan *e-government* yang tertuang dalam peraturan bupati No 56 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan *e-government*. Pemerintah Kabupaten Purbalingga membuat perbup ini dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi *e-government*.

Sejalan dengan diharapkan adanya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar terwujudnya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Purbalingga mengembangkan aplikasi “Media Aspirasi dan Tanya Jawab Untuk Rakyat (MATUR) Bupati” dalam versi android dan iOS. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan masyarakat

---

<sup>3</sup>Haura Atthahara, “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 3, No.1, Juli 2018, hlm. 66-67.



memberikan aspirasi, kritik dan saran.<sup>4</sup> MATUR Bupati versi Android dan iOS menunjukkan lokasi pelaporan yang lebih akurat karena berbasis jaringan dan GPS dengan kapasitas aplikasi hanya 9,6 MB. MATUR Bupati ini juga terintegrasi dengan aplikasi pengaduan milik pusat [lapor.go.id](http://lapor.go.id) dan aplikasi pengaduan milik Provinsi Jawa Tengah [laporgub.jatengprov.go.id](http://laporgub.jatengprov.go.id). Total laporan yang berhasil diakomodir dari [lapor.go.id](http://lapor.go.id), [laporgub.jatengprov.go.id](http://laporgub.jatengprov.go.id) dan MATUR Bupati sampai saat ini 29 Januari 2020 terhitung sudah ada 466 laporan yang masuk.<sup>5</sup>

Dengan adanya aplikasi ini pemerintah Purbalingga memberikan wadah untuk menampung aspirasi, pengaduan maupun keluhan dari masyarakat sehingga nantinya aduan tersebut dapat didistribusikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa menanggapi pengaduan tersebut.

Pemerintah memanfaatkan teknologi yang ada dengan mengupayakan adanya *e-government* untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan dari pemerintah. Dengan ini diharapkan tercapai kemaslahatan masyarakat banyak. Sama halnya dengan *maṣlahah* yang berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. *Maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣālih* yang artinya "mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istiṣhlāh* yang berarti "mencari

---

<sup>4</sup>Neni Suherni, "Asyik, Warga Purbalingga Bisa Akses Aplikasi "Matur Bupati" Versi Android dan iOS, *iNews.id*, <https://jateng.inews.id/berita/asyik-warga-purbalingga-bisa-akses-aplikasi-matur-bupati-versi-android-dan-ios>, diakses 20 Januari 2021, pukul 19.30 WIB.

<sup>5</sup>Dinkominfo, "Dinkominfo Purbalingga Kembangkan Aplikasi Matur Bupati Versi android", *Dinkominfo*, <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/dinkominfo-purbalingga-kembangkan-aplikasi-matur-bupati-versi-android/>, diakses 20 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

kebaikan" tak jarang kata *maṣlahah* atau *istishlāḥ* ini disertai dengan kata *al-munāsib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."<sup>6</sup>

Dengan adanya MATUR Bupati di Purbalingga ini pemerintah mencoba memberikan layanan yang lebih optimal dan cepat tanggap dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Diharapkan masyarakat Purbalingga dapat merasakan manfaat dari adanya aplikasi MATUR Bupati ini.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No 56 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan *E-Government* Perspektif *Maṣlahah* (Studi Aplikasi MATUR Bupati)”

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Implementasi**

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>7</sup> Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi dapat diketahui implementasi mengandung tiga hal yaitu adanya tujuan, adanya kegiatan pencapaian tujuan, adanya hasil kegiatan.

---

<sup>6</sup>H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* ( Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 112.

<sup>7</sup>Sidrotul Muntaha, “Apa yang dimaksud dengan Implementasi”, <https://www.alihamdan.id/implementasi/>, diakses 21 Januari 2021, pukul 20.20 WIB.

<sup>8</sup>Rita Prima Bendriyanti dan Leni Natalia Zulita, Implementasi E-Arsip Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Jurnal Media Infotama*, Vol. 8, No.1, Februari 2012, hlm. 159.

## 2. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2019

Peraturan Bupati No 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *E-Government* yang ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 26 Juni 2019 oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi untuk diperhatikan dan dijalankan dengan semestinya. Perbup ini berisikan tentang bagaimana sasaran dan ruang lingkup penyelenggaraan *e-government* di Purbalingga.

## 3. *E-Government*

Secara umum *e-government* dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah.<sup>9</sup> *E-government* sebagai suatu mekanisme interaksi baru berbasis elektronik antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Terkait *e-government* yang ada di Purbalingga, DINKOMINFO Purbalingga mempunyai istilah SPBE yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam sistem ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik maupun saran untuk pemerintah melalui sistem pelayanan elektronik dari Dinkominfo. Sistem ini sudah berjalan dari tahun 2017 dan ada dibawah naungan DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Dermawan Napitupulu, dkk, *E-Government Implementasi Strategi & Inovasi* (t.k. Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3.

<sup>10</sup>Pradita Novianthy, “Sistem Support DINKOMINFO kabupaten Purbalingga”, *Wawancara*, pada hari Kamis, 18 Februari 2021, pukul 09.30 WIB.

#### 4. Aplikasi MATUR Bupati

MATUR Bupati adalah singkatan dari Media Aspirasi dan Tanya Jawab Untuk Rakyat yang berupa aplikasi MATUR Bupati versi *mobile*. Untuk versi web dapat diakses melalui browser internet dengan alamat [maturbup.purbalinggakab.go.id](http://maturbup.purbalinggakab.go.id). sedangkan untuk versi *mobile* bisa diunduh melalui *play store*, dengan kata kunci MATUR Bupati Purbalingga. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan aspirasi, kritik maupun saran kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga.<sup>11</sup>

#### 5. *Maṣlahah*

Dari sisi etimologis, kata *maṣlahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu (صَلَح) *salaha*. Kata *maṣlahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata manfaat dan faedah.<sup>12</sup> Secara umum dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *maṣlahah* ialah sesuatu yang membawa atau tercapainya kebaikan kepada manusia. Sedangkan yang dimaksud *maṣlahah* dalam skripsi ini adalah kemaslahatan yang terkandung dalam MATUR Bupati.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Admindesa “Dinkominfo Purbalingga terus sosialisasikan Aplikasi Pengaduan ‘Matur Bupati’”, <https://bandingan-purbalingga.desa.id/?p=47>, diakses pada 20 Desember 2020, pukul 20.15.

<sup>12</sup>Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, hlm. 82.

1. Apakah implementasi Peraturan Bupati No 56 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan *E-Government* melalui aplikasi MATUR Bupati sudah berjalan dengan baik?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap aplikasi Matur Bupati?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

Penelitian yang dilakukan ini tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Tujuan penelitian dapat memahami implementasi peraturan bupati No 56 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Purbalingga melalui MATUR Bupati
2. Memahami faktor-faktor penghambat penyelenggaraan *e-government* MATUR Bupati.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki manfaat yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis :

1. Manfaat secara teoritis sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman atau menambah wawasan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai implementasi peraturan bupati kabupaten Purbalingga tentang penyelenggaraan *e-government* perspektif *masalah* studi aplikasi MATUR Bupati.

2. Manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

- b. Memberikan informasi mengenai aplikasi MATUR Bupati sebagai sarana untuk menampung kritik, saran maupun keluhan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten Purbalingga.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati No 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *E-Government* Perspektif *Maṣlahah* Studi Aplikasi MATUR Bupati. Namun ada beberapa skripsi lain yang membahas *e-government* dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

1. Skripsi karya Emel Apriandes, yang berjudul “Analisis SWOT Guna Penyusunan Rencana Induk *E-Government* pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim” skripsi ini membahas tentang bagaimana melakukan analisis SWOT guna penyusunan rencana induk *e-government* pada website Pemerintahan Kabupaten Muara Enim pada Kantor Komunikasi dan Informatika dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan menghasilkan analisis penyusunan rencana induk *e-government* pada Pemerintahan Kabupaten Muara Enim menggunakan analisis SWOT dan membantu pihak pegawai dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk website *e-government*.<sup>13</sup>
2. Skripsi karya Fahrudin Jaya, yang berjudul “Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Palopo dalam Penyelenggaraan *E-Government* di Dinas

---

<sup>13</sup>Emel Apriandes, “Analisis Swot Guna Penyusunan Rencana Induk E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim” *Skripsi* (Palembang, Universitas Bina Darma, 2013).



Kependudukan dan Catatan Sipil” skripsi ini membahas tentang penyelenggaraan kebijakan *e-government* di Kota Palopo dan bagaimana kesiapan perangkat penyelenggaraan *e-government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dengan kesimpulan pemerintah Kota Palopo belum memiliki rencana induk pengembangan *e-government* lembaga dan perda yang mengatur tentang penyelenggaraan *e-government* namun pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat memadai dalam penyelenggaraan *e-government* dengan program Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan dan e-KTP).<sup>14</sup>

3. Skripsi karya Nurul Wahida Safitri, yang berjudul “Penerapan *E-Government* di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang” skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan *e-government* di pusat pelayanan informasi dan pengaduan Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan *e-government* tersebut dengan kesimpulan pelayanan yang diberikan oleh aparat pusat pelayanan informasi dan pengaduan Kabupaten Pinrang sudah cukup baik dengan diterapkannya *e-government* namun terdapat beberapa faktor penghambat yaitu jaringan internet dan sosialisasi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Fahrudin Jaya, “Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Palopo dalam Penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil” *Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2011).

<sup>15</sup>Nurul Wahida Safitri, “Penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang” *Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016).

Agar lebih memahami persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang dilakukan penulis maka di buat table seperti dibawah ini :

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis SWOT Guna Penyusunan Rencana Induk <i>E-Government</i> pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pelaksanaan <i>e-government</i> di daerah.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Emel Apriandes ini membahas tentang bagaimana penyusunan rencana induk <i>e-government</i> dengan analisis SWOT sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan <i>e-government</i> dengan perspektif <i>maşlahah</i> .
2.	Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Palopo dalam Penyelenggaraan <i>E-Government</i> di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana respon pemerintah terhadap <i>e-government</i> .	Dalam skripsi yang ditulis oleh Fahrudin Jaya ini membahas tentang belum siapnya Pemerintah Kota Palopo dalam penyelenggaraan <i>e-government</i> sedangkan penulis meneliti tentang kesiapan Pemerintah Purbalingga dengan mengembangkan aplikasi Matur Bupati sebagai wujud penyelenggaraan <i>e-government</i> .
3.	Penerapan <i>E-Government</i> di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan <i>e-</i>	Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Wahida safitri ini membahas tentang

	Kabupaten Pinrang	<i>government</i> pada pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.	pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang sedangkan penulis meneliti tentang aplikasi MATUR Bupati
--	-------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan adanya telaah pustaka yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pembahasan yang dilakukan penulis dengan karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya.

#### F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori dari Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *E-Government* Perspektif *Maṣlahah* Studi Aplikasi MATUR Bupati.

Bab ketiga berisikan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisikan tentang analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi penelitian yaitu Implementasi Peraturan Bupati No 56 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan *E-Government* Perspektif *Maṣlaḥah* Studi Aplikasi MATUR Bupati.

Bab kelima berisikan kesimpulan, saran dari analisis yang dilakukan serta kata penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi *e-government* di kabupaten Purbalingga berdasarkan peraturan bupati no 56 tahun 2019 tentang penyelenggaraan *e-government* dilihat dari faktor penentu kesiapan daerah untuk menerapkan *e-government* seperti indikator Richardus Eko Indrajit dkk yaitu : infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah, kesiapan sumber daya manusia di pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, perubahan paradigm. Dari beberapa indikator di atas dapat dinilai sudah terpenuhi sehingga pelaksanaan *e-government* di kabupaten Purbalingga dirasa sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan diciptakannya Aplikasi MATUR Bupati sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
2. Aplikasi MATUR Bupati ini tergolong dalam *Maṣlahah hajiyyah* yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi, namun apabila tidak dapat terwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan namun akan menimbulkan kesulitan saja. Pemerintah Purbalingga menciptakan aplikasi MATUR Bupati ini bertujuan untuk menyempurnakan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan mempermudah masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah dengan memanfaatkan

teknologi informasi. Penggunaan aplikasi ini dianggap efisien karena dapat dilakukan dimana pun dan kapanpun tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah berbasis online ini informasi ataupun jawaban dapat dipertanggungjawabkan karena dikelola oleh pemerintah sendiri sehingga masyarakat terhindar dari berita hoax.

## **B. Saran**

Kepada pemerintah yang bertugas dalam mengoperasikan *e-government* sehubungan dengan adanya beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan *e-government* ini perlu mendapatkan perhatian agar segera ditangani sehingga nantinya pelaksanaan *e-government* berjalan lebih sempurna.

Kepada masyarakat kabupaten Purbalingga pengguna aplikasi MATUR Bupati agar menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah digunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan supaya tercapai kehidupan yang damai dan sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya, 2012.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang : Noerfikri, 2019.
- Indrajit, R. Eko, dkk. *e-government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Napitulu, Darmawan, dkk. *E-government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. t.k : Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sadhana, Kridawati. *Realitas Kebijakan Publik*. Malang : UM Press/Ikip Malang, 2011.
- Setiawan, Johan dan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suprawoto. *Government Public Relations*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Supriatna, Tjahja, dan Abd Halil Hi Ibrahim. *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gramasurya, 2020.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tan, David, dkk. *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020.

Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Widodo, Joko. *Analisis kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.

### **Jurnal Ilmiah:**

Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyin". *An-Nahdhah*. Vol. 10, No. 20, 2017, 236.

Attahahara, Haura. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta". *Jurnal Politikom Indonesia*. VOL. 3, NO.1, 2018, 66-67.

Basri, Rusdaya. "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi tentang masalah (Studi Analisis Perbandingan)". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9, No. 2, 2011, 183.

Fahurrahman, M. "Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik". *Tarbawi*. Vol. 2, No. 02, 2016, 15.

Hartono, dkk. "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web". *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. 6, No. 1, 2010, 9.

Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *al-Mizan*. Vol. 2, No. 1, 2018, 119-123.

Ramdani, Muhammad Ali dan Abdullah Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01, 2017, 3.

Rokhmad, Abu. "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah". *Al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VII, No. 1, 2013, 9-10.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah". *Jurnal Studi Islam*. Vol. 14, No. 1, 2013, 82.

Rusfi, Mohammad. "Validasi Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII, No. 1, 2014, 64.

Zulita, Leni Natalia dan Rita Prima Bendriyanti, Implementasi E-Arsip Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Jurnal Media Infotama*, Vol. 8, No.1, 2012, 158.

### **Skripsi :**

Apriandes, Emel. Analisis Swot Guna Penyusunan Rencana Induk E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. *Skripsi*. Palembang : Universitas Bina Darma, 2013.

Jaya, Fahrudin. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Palopo dalam Penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2011.

Safitri, Nurul Wahida. Penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang. *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2016.

### **Website :**

Admindesa. "Dinkominfo Purbalingga terus Sosialisasikan Aplikasi Pengaduan 'Matur Bupati'", <https://bandingan-purbalingga.desa.id/?p=47>, diakses 20 Desember 2020.

Dinkominfo. "Dinkominfo Purbalingga Kembangkan Aplikasi Matur Bupati Versi android", <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/dinkominfo-purbalingga-kembangkan-aplikasi-matur-bupati-versi-android/>, diakses 20 Desember 2020.

Muntaha, Sidrotul. "Apa yang dimaksud dengan Implementasi", <https://www.alihamdan.id/implementasi/>, diakses 21 Januari 2021.

Mursid, Fauziyah dan Esthi Maharani. "Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta", <https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw>, diakses 17 Desember 2020.

Suherni, Neni. "Asyik, Warga Purbalingga Bisa Akses Aplikasi "MATUR Bupati" Versi Android dan iOS", <https://jateng.inews.id/berita/asyik-warga-purbalingga-bisa-akses-aplikasi-matur-bupati-versi-android-dan-ios>, diakses 20 Januari 2021.

**Peraturan Bupati :**

Peraturan Bupati No 56 Tahun 2019

Peraturan Bupati Purbalingga No. 90 Tahun 2018

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003

